

**PARTISIPASI CIVIL SOCIETY DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KOTA BADAR LAMPUNG
(Studi Pada LSM Emak.Id)**

(Skripsi)

Oleh

**SATRIONO
NPM 2116041106**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PARTISIPASI CIVIL SOCIETY DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada LSM Emak. Id)

Oleh

Satriono

Permasalahan sampah di Kota Bandar Lampung semakin kompleks, ditandai dengan peningkatan volume sampah setiap tahunnya. Hal ini disebabkan minimnya infrastruktur pengelolaan, seperti Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bakung yang masih menggunakan sistem *open dumping*, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga, memperburuk kondisi lingkungan. Partisipasi *civil society*, sangat penting dalam mengedukasi masyarakat, menginisiasi bank sampah. Kolaborasi ini dapat memperkuat pengelolaan sampah berbasis komunitas yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi *civil society* dalam pengelolaan sampah di kota bandar lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang dikaji dengan teori partisipasi menurut Basrowi dalam Dwiningrum (2011). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM Emak. Id cukup baik dalam membangun kesadaran masyarakat melalui pendekatan sosialisasi dan edukasi berbasis komunitas, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal pendanaan. Temuan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara masyarakat sipil (*civil society*) dan pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang memiliki jangkauan luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas pendanaan, serta perluasan kemitraan lintas sektor guna memperkuat peran *civil society* dalam pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Partisipasi, *civil society*, bank sampah

ABSTRACT

Civil Society Participation in Waste Management (A Study on Emak.Id)

By

Satriono

The waste problem in Bandar Lampung City is becoming increasingly complex, marked by a growing volume of waste each year. This issue is exacerbated by the lack of proper waste management infrastructure, such as the Bakung Final Processing Site (TPA), which still uses open dumping, and The low level of public awareness worsens the environmental condition. Civil society participation plays a crucial role in educating the public and initiating community-based waste banks. Such collaboration strengthens the effectiveness of community-driven waste management. This study aims to analyze the participation of civil society in waste management in Bandar Lampung City. The research employs a descriptive qualitative method, analyzed using the participation theory by Basrowi (as cited in Dwiningrum, 2011). Data collection techniques include interviews and documentation. The findings show that the NGO Emak.Id has been relatively successful in raising community awareness through grassroots-based education and outreach, although financial challenges remain. These findings highlight the importance of collaboration between civil society and the government in establishing a broad-reaching and sustainable waste management system. Hence, strengthening policy frameworks, enhancing financial capacity, and expanding multi-stakeholder partnerships are essential to reinforce the role of civil society in fostering participatory and sustainable waste management systems

Keywords: Participation, civil society, waste bank

**PARTISIPASI CIVIL SOCIETY DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KOTA BADAR LAMPUNG
(Studi Pada LSM Emak.Id)**

Oleh

Satriono

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA Ilmu Administrasi Negara**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

Judul Skripsi : **PARTISIPASI CIVIL SOCIETY DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada LSM Emak.Id)**

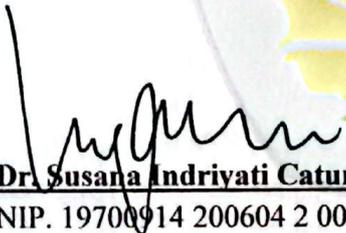
Nama Mahasiswa : **Satriono**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116041106**

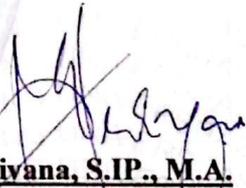
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



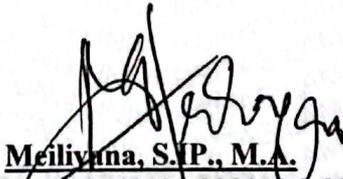

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.

NIP. 19700914 200604 2 001


Meilivana, S.IP., M.A.

NIP. 19740520 200112 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meilivana, S.IP., M.A.

NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si



Sekretaris : Meiliyana, S.IP., M.A.



Penguji : Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 13 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Satriono
NPM. 2116041106

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Satriono. Penulis dilahirkan di Pagar Bukit pada tanggal 15 Oktober 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sudiono dan Ibu Tukimah . Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SD Negeri 2 Pagar Bukit pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Bangkuntat sampai dengan tahun 2017. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Bangkuntat sampai dengan tahun 2020.

Pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur PMPAP. Selama menjadi mahasiswa penulis telah mengikuti beberapa kegiatan yang ada di dalam maupun di luar kampus. Penulis aktif dalam berorganisasi yaitu menjadi Staf Bidang Kajian Pengembangan Keilmuan (KPK) dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) tahun 2023. Dan menjadi Staf KOMINFO (Komunikasi dan Informasi) dalam Ikatan Mahasiswa Muslim Pesisir Barat (IKAM PESBAR) Tahun 2022.

Pada bulan Januari-Februari tahun 2024 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karang Lintang , Kecamatan Kasui , Kabupaten Waykanan. Selanjutnya pada bulan Maret-Juni 2024 penulis juga melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan ikut penelitian di Desa Brajajarjosari, Kecamatan Brajaselebah Kabupaten Lampung Timur.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan-Mu lah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah, 94:6-8)

“Cobaan hidupmu bukanlah untuk menguji kekuatan dirimu. Akan tetapi menakar seberapa besar kesungguhan dalam memohon pertolongan kepada Allah ”

(Ibnu Qoyyim)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau inginkan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Chandra)

“Keberhasilan adalah perjalanan panjang dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”

(Winston Churchil)

“Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menjaga lingkungan, adalah kontribusi besar untuk masa depan yang lebih baik .”

(Satriono)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,

Kupersembahkan karya tulis ini,

Untuk orang-orang yang aku cintai dan sayangi:

Bapak dan Ibu Tercinta

Yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang luar biasa, serta support yang tiada habisnya. Terima kasih untuk segala pengorbanan, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepadaku.

Kakak dan Adikku Tersayang,

Yang selalu membantu, mendoakan, memberikan motivasi, memberikan dukungan, dan selalu memberikan kasih sayang untukku.

Para Dosen dan Civitas Akademika,

Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan, dukungan, dan doa.

Almamater Tercinta,

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga telah menyelesaikan skripsi dengan judul "PARTISIPASI CIVIL SOCIETY DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Pada Lsm Emak.id)" sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Negara. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Teristimewa kedua orang tuaku tercinta Bapak Sudiono dan Ibu Tukimah yang selalu memberikan doa, kasih sayang, support, dan selalu ada setiap harinya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan segala hal yang telah diberikan selama ini. Semoga ayah selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang lancar, lindungan dimanapun berada, dan semoga mama diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan berikan tempat terbaik di sisi Allah swt.
2. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, Sos., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, pembimbing akademik, dan pembimbing kedua. Terima kasih atas dedikasi, arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di jurusan administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima

kasih atas segala ilmu, dukungan, semangat, dan apresiasi yang diberikan kepada penulis

5. Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing utama yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, kebaikan dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Ibu Rahayu Sulistiowati S. Sos., M.Si selaku dosen penguji penulis. Terima kasih atas saran dan kritik yang membangun, serta bimbingan yang diberikan sehingga membuat penulis menyelesaikan skripsi dengan lebih baik.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh staff dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menempuh studi selama masa perkuliahan.
9. Seluruh informan penelitian, Bapak Agus Sholihin , Bapak Ahmad Khoirun Syam, Ibu Elis Novianti, Ibu Dartijah, Ibu Kartinawati, dan Ibu Nurhasanah atas ilmu dan waktunya dalam membantu penulis dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
10. Kakak-kakaku tersayang, Dwi Retno Sari, Suadman, Asep Setiawan, Sumino, dan Suminah yang sudah memberikan support, doa, dan bantuannya dalam penulisan skripsi serta kakak yang lainnya terima kasih atas doa dan dukungannya semoga kakak- kakaku lancar rejekinya.
11. Adik-adiku tersayang, Vina Mujiati dan Bambang Sugiono yang sudah memberikan semangat, doa, dan kasih sayang untuk kakak. Semangat Kuliahnya dan Kerjanya sayang-sayang kakak semoga kalian bisa meraih cita-cita, membahagiakan orang tua, dan jadi anak sholeh.
12. Untuk semua anggota keluargaku tercinta, terima kasih atas segala doa, dukungan dan kasih sayangnya yang selalu diberikan kepada penulis.
13. Untuk Alghifari, Safwan, Velly, Mutia, Cristian, Figo, Dwi, Pacri, Pinka ,There dan Ruweisha Saya mengucapkan terima kasih telah memberikan bantuan yang

luar biasa dalam proses penyusunan skripsi ini, baik dari segi ide, dukungan moral, maupun kontribusi lainnya.

14. Member Bascam Ari x Duta Alghifari, Figo, Bima, Dwi, Agung, Iksan, Fajar, Dika, Ari, Duta, Fido, Doni, , Naufal, Afif, Pacri, Fahrul dan Gilang sebagai sahabat seperjuangan sejak awal perkuliahan hingga sekarang. Terima kasih atas segala dukungan, doa, canda tawa, ketulusan hingga telah memberikan warna selama perkuliahan. Semoga kita semua bisa sukses bareng.
15. Member FS (Fans Satrio), Alghifari, Amel, Agung, Bima, Cristian,Dwi, Mutia, Pinka Velly, Toni, Ruweisha dan Vivi sebagai sahabat seperjuangan sejak awal perkuliahan hingga sekarang. Terima kasih atas segala dukungan, doa, canda tawa, ketulusan hingga telah memberikan warna selama perkuliahan. Semoga kita semua bisa sukses bareng.
16. Untuk teman-teman JEKLA (Ojek Unila), terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bergabung sebagai member Jekla, sehingga sedikit banyaknya bisa membantu dalam menyelesaikan perkuliahan. .
17. Kepada seluruh teman-teman GILGAMARA , terimakasih untuk setiap kebersamaan baik suka maupun duka selama masa perkuliahan, terimakasih atas bantuan dan dukungan satu sama lain sampai pada tahap ini. Semangat untuk kita semua.
18. Kepada mba abang HIMAGARA terkhusus Mba Dinda dan bang Rafi serta mba abang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua bantuannya selama perkuliahan hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
19. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi untuk diri sendiri.

Bandar Lampung 09 Juni 2025

Satriono

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I.PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat penelitian	6
II.TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Tentang Partisipasi	10
2.3 Tinjauan Tentang Masyarakat Sipil (<i>Civil Society</i>).....	20
2.4 Tinjauan Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat.....	23
2.5 Kerangka Pikir.....	25
III METODE PENELITIAN	27
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	27
3.2 Lokasi Penelitian	27
3.3 Fokus Penelitian	29
3.4 Sumber Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Teknik Analisis Data	33
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	33
IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1.1 Sejarah singkat LSM Emak. Id Kota Bandar Lampung.....	37

4.1.2	Visi dan Misi LSM Emak. Id	38
4.1.3	Kegiatan Bank Sampah Emak.id.....	38
4.1.4	Struktur Organisasi LSM Emak. Id.....	39
4.1.5	Program Bank Sampah.....	39
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	41
V. PENUTUP.....		87
5.1	Kesimpulan	87
5.2	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....		90
LAMPIRAN.....		95

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	7
2. Informan Penelitian.....	32
4. Struktur Organisasi LSM Emak. Id.....	39
3. Matriks Hasil Penelitian.....	85

DAFTAR GAMBAR

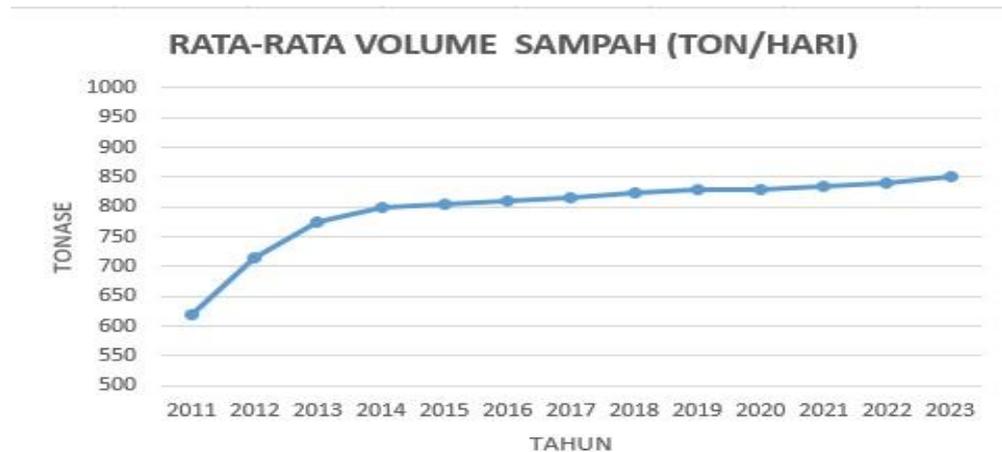
Gambar	Halaman
1. Peningkatan Volume Sampah di Kota Bandar Lampung.....	2
2. Kerangka Pikir.....	26
3. Sosialisasi Dan Edukasi Program Bank Sampah.....	47
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023.....	59
5. Jumlah Sampah Terangkut Oleh Emak. Id.....	69

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah sampai saat ini menjadi sebuah permasalahan lingkungan yang harus dihadapi khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Masalah sampah di Indonesia bukanlah menjadi masalah baru hal ini karena volume sampah setiap harinya mengalami peningkatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik maupun anorganik. Patuwo dkk (2020) mengungkapkan peningkatan volume sampah dipengaruhi peningkatan aktivitas masyarakat, urbanisasi yang tidak terkendali dan kemajuan ekonomi sehingga mempersulit sektor publik untuk menangani permasalahan sampah.

Selain itu permasalahan sampah menjadi isu lingkungan yang semakin kompleks di kota-kota besar di Indonesia termasuk Kota Bandar Lampung. Sebagai ibu Kota Provinsi Lampung tidak terkecuali mengalami permasalahan sampah. Berdasarkan Sistem Informasi Pengendalian Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (SIPSNKLHK) Kota Bandar Lampung masuk dalam kategori kota kotor di Indonesia. Predikat ini muncul akibat penanganan sampah dan kebersihan kota yang dianggap kurang memadai terutama terkait dengan peningkatan volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang efektif.



Gambar 1. Peningkatan volume sampah di Kota Bandar Lampung

Sumber: <https://bandarlampungkota.go.id> (Diakses pada 28 Juli 2024)

Berdasarkan grafik diatas, Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan jumlah timbulan sampah dari waktu ke waktu. Peningkatan ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi yang tinggi berbanding lurus dengan volume sampah yang dihasilkan. Akan tetapi, peningkatan produksi sampah ini tidak diiringi dengan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung saat ini masih didominasi oleh metode pengumpulan secara langsung (*door to door*), yang kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung. TPA tersebut masih menggunakan metode *open dumping* atau pembuangan terbuka tanpa adanya proses pengolahan lanjutan. Praktik ini menyebabkan akumulasi sampah dalam jumlah besar yang tidak hanya menurunkan kualitas lingkungan, tetapi juga menimbulkan potensi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. Selain itu, meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah, implementasinya di lapangan belum optimal. Kurangnya penegakan hukum serta tidak diterapkannya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran menjadi faktor yang menghambat peningkatan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam mengelola sampah secara bijak. Prihatin (2020) mengungkapkan meningkatnya volume sampah menyebabkan sejumlah dampak

negatif yaitu: pencemaran lingkungan, masalah kesehatan, banjir, kehilangan estetika kota dan meningkatkan biaya pengelolaan sampah. Di tengah meningkatnya masalah pengelolaan sampah perlu adanya *good governance*. Salah satu aktor *good governance* yang diperlukan adalah masyarakat sipil (*civil society*) *civil society* dalam hal ini dapat dipahami sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berperan aktif dalam berbagai isu publik yang menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Suharto (2008) mengungkapkan LSM secara umum adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sukarela dan tidak berorientasi pada keuntungan.

Partisipasi LSM dapat mencakup berbagai kegiatan seperti pengorganisaan, program daur ulang, edukasi tentang pengelolaan sampah serta advokasi kebijakan pengelolaan sampah yang baik. LSM memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk menjangkau lapisan masyarakat secara luas yang tidak tersentuh oleh program-program pemerintah. Selain itu Soetomo (2004) mengungkapkan bahwa LSM berdasarkan asas sukarela dan pancasila, yang bergerak dalam berbagai bidang seperti lingkungan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi LSM dalam pengelolaan sampah sudah memberikan kontribusi positif seperti peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan program-program daur ulang dan pelibatan komunitas dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Keberadaan LSM sebagai wujud kepedulian dan kontribusi atas permasalahan di masyarakat. Dikutip dari *Idntimes.com* pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi kepada LSM yang sudah berpartisipasi memberikan manfaat kepada masyarakat dan memberikan solusi kepada pemerintah kota untuk mengatasi permasalahan tentang sampah salah satunya melalui program bank sampah. Bentuk keterlibatan *civil society* dalam upaya membantu menyelesaikan permasalahan publik, dapat dilihat dari banyak organisasi non pemerintah, atau dikenal juga sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang ikut berpartisipasi dengan memberikan masukan berupa inovasi program kepada pemerintah, yang berdampak positif terhadap masyarakat. Salah satu LSM di Kota Bandar Lampung yang

berfokus pada pengelolaan sampah yaitu Emak.Id yang mulai beroperasi pada tahun 2021 dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan sampah yang semakin meningkat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melalui program Bank Sampah. Emak.Id diharapkan dapat memperpanjang usia TPA tersebut dengan mengurangi volume sampah yang masuk. LSM Emak.Id melibatkan partisipasi aktif masyarakat khususnya ibu rumah tangga. Selain itu LSM Emak.Id menawarkan program edukasi bagi anak-anak seperti pengajaran calistung (baca tulis hitung) yang pembayarannya menggunakan sampah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang efektif. Akan tetapi dalam pelaksanaan program belum maksimal hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan peneliti dengan pihak Emak.Id terdapat beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program pengelolaan sampah yang diinisiasi oleh LSM Emak. Id meskipun telah memiliki sekitar 5.600 nasabah dan 250 unit bank sampah yang tersebar di wilayah Kota Bandar Lampung, Natar, dan Pesawaran. Kontribusi dalam pengurangan sampah masih relatif kecil dari total 24.000 ton sampah yang dihasilkan oleh kota bandar Lampung setiap bulan LSM Emak. Id baru mampu menangani sekitar 100 ton per bulan atau sekitar 0,42% dari total sampah. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya dukungan dari pihak pemerintah, dan swasta. Rendahnya dukungan dari pihak pemerintah disebabkan oleh lemahnya kordinasi antara LSM Emak.Id dengan pemerintah meskipun kedua belah pihak adanya inisiatif namun dalam implementasinya sering tidak optimal, misalnya program Bank Sampah yang diusulkan oleh LSM Emak. Id sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah dalam hal sosialisasi dan pelaksanaan. Keterbatasan ini mengindikasikan perlunya peningkatan dukungan dari pihak pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Bandar Lampung. Selain itu pihak Emak. Id belum melakukan kolaborasi dengan swasta, hal ini disebabkan oleh minimnya insentif yang diterima oleh pihak swasta dan keterbatasan kebijakan yang mendorong kolaborasi antara pihak swasta dengan LSM Emak. Id.

Pada penelitian terdahulu terkait partisipasi LSM dalam pengelolaan sampah belum maksimal sehingga belum memberikan peningkatan kontribusi dalam pengelolaan sampah. Hal ini ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia dkk (2020) menyebutkan bahwa keterlibatan LSM dalam pengelolaan sampah masih terbatas pada sosialisasi tanpa implementasi program yang berkelanjutan. Selanjutnya temuan penelitian oleh Melyanti (2019) menunjukkan bahwa kurangnya dukungan dan koordinasi menyebabkan program tidak berjalan efektif. Terkait dengan sejumlah hasil penelitian terdahulu masih terlihat perbedaan pengaruh dalam penerapan partisipasi tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu akan melihat sejauh mana partisipasi LSM dalam pengelolaan sampah berjalan dengan baik sebagai sarana dalam penilaian partisipasi LSM Emak.id di Kota Bandar Lampung. Selain itu akan diidentifikasi terkait faktor penghambat partisipasi LSM Emak. Id dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Relevansi antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu kajian tentang penerapan partisipasi LSM yang digunakan sebagai alat untuk mengukur atau menilai partisipasi LSM dalam pengelolaan sampah.

Dikutip dari *idntimes.com* partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan LSM Emak. Id dalam mengelola sampah, sebagai lembaga yang berfokus pada pengurangan sampah yang berfokus pada 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*) LSM Emak.Id sangat bergantung pada kontribusi masyarakat dalam memilah dan menyetorkan sampah yang memiliki nilai ekonomis. Akan tetapi partisipasi masyarakat di Kota Bandar Lampung masih tergolong rendah, hal ini menghambat upaya pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: Partisipasi *civil society* dalam pengelolaan sampah (Studi pada LSM Emak. Id sebagai komunitas pengelola sampah di Kota Bandar Lampung).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana partisipasi LSM Emak. Id dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Memperoleh deskripsi analisis bagaimana partisipasi LSM Emak. Id dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis atau akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya lagi kajian yang berhubungan dengan Ilmu Administrasi Negara, khususnya kajian tentang partisipasi *civil society* (LSM Emak.Id) dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan manfaat praktis dengan dapat memperkaya wawasan, pengetahuan dan informasi sebagai referensi khususnya LSM Emak.Id, pemerintah dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian seperti teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain. penelitian terdahulu dicantumkan untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Tahun dan Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	“Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society dan Swasta Dalam Program Bank Sampah Di Pasar Baru Kota Probolinggo ”(2019) oleh Imelda Merry Melyanti.	Untuk menganalisis pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta dalam program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori kemitraan multi stakeholder menurut James E. Austin (1998) yang meliputi: a. Saling Menguntungkan kedua belah pihak b. Memiliki tujuan yang sama c. Kolaborasi berdasarkan kepercayaan d. Tanggung jawab yang jelas e. Kesiapan untuk beradaptasi f. Pengelolaan sumber daya yang efektif.	Pola kemitraan yang terjadi adalah kemitraan <i>mutualism</i> . peran pemerintah sebagai penguat komitmen, dan ikut serta baik secara fisik maupun non fisik .peran swasta memberikan bantuan fisik dan non fisik serta civil society sebagai pengelola bank sampah. akan tetapi kurangnya dukungan dan koordinasi menyebabkan program Bank Sampah tidak berjalan efektif.
2	“Peran Lsm Spektra Dalam <i>Mutualism Partnership</i> Program Bank Sampah” (2020) oleh Aziza	Untuk menganalisis kontribusi LSM dalam membangun kolaborasi antara masyarakat dengan stakeholder lain dalam	Peran LSM spektra dijalankan dengan mengacu pada kesejahteraan masyarakat dan penyediaan

Nur Aulia ,Erlinda Choirunisa, Lukman.	<p>pengelolaan sampah. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori kolaborasi menurut Edward Freeman, (1984) yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Stakeholder sebagai pihak yang relevan. Pendekatan kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama Kolaborasi yang berkelanjutan dan dinamis. Kolaborasi dalam pengambilan keputusan Pembangunan kepercayaan Keterlibatan stakeholder dalam inovasi dan perubahan. 	<p>layanan, pengembangan pendidikan partisipasi dan pemberdayaan jaringan . Sedangkan pola kemitraan yang terjalin yaitu melalui <i>mutualism partnership</i> . hal yang perlu ditingkatkan yaitu kreativitas oleh LSM Spektra dalam menjalankan program bank sampah sehingga program bank sampah berkelanjutan.</p>
3. “Analisis Kemitraan Dalam Program Dance4life Untuk Meningkatkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (Studi Pada Pkbi Provinsi Lampung Dan Smkn 4 Bandar Lampung)” (2020) oleh Hana Soraya.	<p>Untuk menganalisis kemitraan dalam program Dance4life yang bertujuan meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kolaborasi antara PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung berkontribusi dalam mencapai tujuan program tersebut. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori kemitraan menurut James E. Austin, (1998) yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Saling Menguntungkan kedua belah pihak Memiliki tujuan yang sama Kolaborasi berdasarkan kepercayaan Tanggung jawab yang jelas Kesediaan untuk beradaptasi Pengelolaan sumber daya yang efektif. 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan antara PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung dalam Program Dance4Life untuk meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja termasuk ke dalam pola kemitraan <i>Linear Collaborative of Partnership</i>, menurut Sulistiyani yang didasarkan pada fenomena-fenomena hubungan kerjasama. Namun dalam kemitraan ini, terdapat kendala-kendala yang menjadi sebuah tantangan untuk dihadapi bersama yaitu perbedaan perspektif tentang pentingnya sex education, jumlah target dari sasaran program, serta <i>memorandum of understanding</i> yang tidak mengalami pembaruan selama program masih berjalan.</p>

4	“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Saluran Irigasi Dusun Palece” (2023) oleh Widyawati, Sukadji Sarbi, Dermawan.	Untuk menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di saluran irigasi dusun palace. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori partisipasi masyarakat menurut Robert Chambers (1993) yang meliputi: a. Partisipasi aktif dan partisipasi pasif b. Peningkatan kapasitas masyarakat c. Refleksi dan pembelajaran d. Peran profesional dalam partisipasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah cenderung tinggi dan partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan warga masyarakat banyak yang menyetujui bahwa sampah adalah sesuatu yang harus dibuang oleh karena itu masyarakat berpartisipasi dalam mengelolah sampah lalu membuangnya ke tempat sampah.
5	“Partisipasi Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Dalam Mewujudkan Lingkungan Hijau yang Bebas Bau TPS: Peran Penghijauan Dalam Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan” (2023) oleh Dwi Santoso, Etty Wahyuni, Anang Sulistio, Nurman Hidayat.	Untuk menganalisis partisipasi mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk mewujudkan lingkungan hijau yang bebas bau TPS. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori pembangunan berkelanjutan menurut Brundtland Commission (1987) yang meliputi a. Penekanan pentingnya teknologi dan inovasi b. Peningkatan kualitas hidup c. Pemenuhan kebutuhan dasar d. Keadilan antar generasi. e. Keterkaitan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan.	Hasil penelitian menunjukkan dampak positif dalam menciptakan lingkungan hijau yang bebas bau TPS dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kolaborasi antara mahasiswa KKN dan masyarakat setempat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Mahasiswa KKN berperan sebagai agen perubahan yang membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Partisipasi mahasiswa KKN dalam program penghijauan memberikan manfaat bagi masyarakat dan kesempatan belajar bagi mahasiswa.

Sumber: Diolah oleh Peneliti Tahun 2024

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang penulis paparkan terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu fokus penelitiannya terkait pada partisipasi *civil society* dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Penulis menggunakan teori partisipasi menurut Basrowi dalam Astuti (2011) yang membedakan partisipasi menjadi dua bentuk partisipasi secara fisik dan non fisik dalam menjawab permasalahan penelitian. Penggunaan teori tersebut dikarenakan partisipasi *civil society* dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung belum

sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Terbukti terjadinya peningkatan volume sampah setiap tahunnya di Kota Bandar Lampung.

2.2 Tinjauan Tentang Partisipasi

Menurut Dahl (1989) konsep demokrasi sebagai *polyarchy*, yang mencakup beberapa elemen penting seperti pemilihan yang bebas dan adil, partisipasi masyarakat, serta kebebasan berpendapat. Secara umum demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memungkinkan partisipasi luas dari warga negara dalam proses penyelesaian permasalahan publik. Teori demokrasi dan teori partisipasi saling berkaitan dalam hal menciptakan pemerintah yang representatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Teori demokrasi memberikan landasan bagi pemerintah yang diatur oleh suara rakyat. Sementara teori partisipasi memberikan mekanisme konkret tentang bagaimana rakyat dapat terlibat dalam proses *governance*.

2.2.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi merupakan salah satu prinsip-prinsip dasar yang ada dalam *good governance* yang menjelaskan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pemerintahan yang baik, pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan partisipasi. Setiap definisi yang dikemukakan para ahli memiliki penekanan dan penjelasan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah pengertian partisipasi menurut para ahli:

1. Theodorson dan Raharjo dalam Mardikanto (2013) mendefinisikan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat, di luar pekerjaan atau profesi sendiri, keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antar individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat lainnya.

2. Menurut Hornby dalam Theresia (2015) partisipasi adalah sebuah tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian-bagian tersebut dengan maksud memperoleh manfaat
3. Verhangen dalam Mardikanto (2013) menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.

Berdasarkan beberapa definisi dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosional. Bisa dijelaskan sebagai bentuk demokrasi di mana individu atau kelompok ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kemampuan dan kewajiban dalam mencapai tujuan.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Partisipasi

Selain dari pada definisi dan penjelasan di atas, di dalam partisipasi juga terdapat beberapa prinsip yang mendasari jalanya proses partisipasi dalam masyarakat, adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam panduan pelaksanaan pendekatan partisipatif yang disusun oleh *Departemen Men for International Development (DFID)* dalam Mardikanto (2004) yaitu:

1. Cakupan (*Coverage*)
Semua orang tau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil - hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
2. Kesetaraan dan Kemitraan (*Equal Partnership*)
Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan dan kemampuan serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing - masing pihak.
3. Transparansi (*Transparency*)
Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
4. Kesetaraan Kewenangan (*Sharing Power /Equal Powership*)

Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

5. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*)

Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dan langkah- langkah selanjutnya.

6. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

7. Kerjasama (*Cooperation*)

Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Selain itu, menurut Amartya Sen dalam bukunya *Development as freedom* (1999) prinsip-prinsip partisipasi mencakup beberapa konsep penting yang berkaitan dengan kebebasan individu dan kemampuan masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka berikut adalah beberapa prinsip partisipasi menurut Amartya Sen (1990):

1. Kebebasan Substantif (*Substantive freedom*)

Sen menekankan bahwa partisipasi yang efektif memerlukan kebebasan substantif yaitu kebebasan yang memberikan masyarakat kesempatan nyata untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

2. Pengembangan Kapabilitas (*Capability Expansion*)

Partisipasi yang berarti yang harus didasarkan pada kapabilitas atau kemampuan individu. Setiap orang harus memiliki kapasitas yang memadai untuk mengambil keputusan yang relevan.

3. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Partisipasi bukan hanya hak tetapi cara untuk memberdayakan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

4. Kesetaraan Akses (*Equality of Acces*)

Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu. Terlepas dari status sosial, ekonomi, dan budaya. Setiap individu harus memiliki akses yang setara dalam proses partisipasi.

5. Partisipasi Demokratis dan Inklusif (*Democratic and Inclusive Participation*)

Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi yang bersifat demokratis dan inklusif yang mencakup seluruh elemen masyarakat termasuk kelompok yang sering terpinggirkan.

Dengan prinsip-prinsip ini, Amartya Sen (1990) menekankan bahwa partisipasi harus lebih dari sekedar formalitas, tetapi merupakan mekanisme yang memperluas kebebasan, mengembangkan kapabilitas, memberdayakan dan menjamin kesetaraan bagi setiap individu untuk berperan aktif dalam setiap proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan prinsip-prinsip partisipasi mendukung terciptanya keputusan lebih demokratis, adil dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan dan perspektif berbagai pihak yang terlibat dalam proses partisipasi.

2.2.3 Macam-Macam Partisipasi Dalam Masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011) membedakan partisipasi menjadi empat jenis dalam tahap pelaksanaan yaitu:

1. Pengambilan Keputusan

Tahapan ini diartikan sebagai penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan pergerakan sumber daya dan dana dalam pelaksanaan dan sekaligus penentuan keberhasilan program yang dilaksanakan.

3. Pengambilan Manfaat

Partisipasi ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program.

4. Evaluasi program secara menyeluruh dan bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

Sedangkan menurut Robert Chambers (1983) mengembangkan konsep partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Beberapa macam partisipasi dalam masyarakat menurut Robert Chambers (1983) yaitu:

1. Partisipasi Pasif (*Passive participation*)
Pada tahap ini masyarakat hanya berperan sebagai penerima informasi tanpa memberikan masukan atau pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.
2. Partisipasi dengan Penyediaan Informasi (*Participation in Information Giving*)
dalam partisipasi ini masyarakat terlibat dengan memberikan informasi misalnya melalui survei atau wawancara tetapi tidak memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan akhir.
3. Partisipasi dengan Konsultasi (*Participation by Consultation*)
Pada tingkat ini masyarakat diminta untuk memberikan pendapat atau masukan terhadap rencana yang sedang dibuat oleh pihak luar.
4. Partisipasi untuk Insentif Material (*Participation for material incentives*) jenis partisipasi ini melibatkan masyarakat dengan imbalan tertentu seperti upah atau insentif lainnya.
5. Partisipasi Fungsional (*Functional Participation*)
Dalam partisipasi fungsional masyarakat dilibatkan dalam proyek atau program untuk mencapai tujuan tertentu mereka biasanya terlibat pada tahap implementasi setelah rencana dibuat.
6. Partisipasi Interaktif (*Interactive Participation*)
Pada tahap ini masyarakat terlibat secara aktif dalam seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan .
7. Partisipasi Otonom (*Self - Mobilization*)
Ini adalah tingkat partisipasi tertinggi menurut Chambers masyarakat bertindak secara independen dan menentukan tujuan serta rencana mereka sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Partisipasi otonom mencerminkan kontrol penuh dari masyarakat atas pengambilan keputusan.

2.2.4 Tingkat Partisipasi

Partisipasi masyarakat dapat dilihat dan diukur melalui beberapa tingkatan atau tahapan partisipasi. Wilcox dalam Mardikanto (2013) mengemukakan bahwa terdapat lima tingkatan partisipasi, yaitu:

1. Memberikan Informasi (Information)

Tahap ini merupakan bentuk partisipasi paling dasar, yaitu ketika informasi disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk data, fakta, atau pengetahuan tertentu. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami isu atau kebijakan yang sedang atau akan dijalankan, tanpa adanya keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan.

2. Konsultasi (Consultation)

Pada tingkatan ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau masukan terhadap suatu kebijakan atau program. Meskipun demikian, keterlibatan mereka masih bersifat terbatas, karena mereka tidak dilibatkan secara langsung dalam proses implementasi ide atau keputusan akhir.

3. Pengambilan Keputusan Bersama (*Deciding Together*)

Tahapan ini mencerminkan partisipasi yang lebih aktif, di mana masyarakat turut memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, maupun berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Dalam tahapan ini, masyarakat mulai memiliki ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan bersama pihak penyelenggara.

4. Bertindak Bersama (*Acting Together*)

Pada tahap ini, partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini mencerminkan adanya kemitraan antara masyarakat dan pihak pelaksana program dalam mewujudkan tujuan bersama.

5. Memberikan Dukungan terhadap Kemandirian (*Supporting Independent Initiatives*)

Tingkatan partisipasi tertinggi ini ditunjukkan melalui dukungan yang diberikan kepada kelompok-kelompok lokal atau komunitas yang memiliki

inisiatif sendiri. Bentuk dukungan dapat berupa pendanaan, pemberian nasihat, serta bantuan teknis lainnya, dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan agenda kegiatan secara berkelanjutan.

Sedangkan menurut Sherry Arnstein (1969) tingkat partisipasi masyarakat dibagi menjadi delapan tingkatan yang dikelompokkan kedalam tiga kategori utama berikut tingkatan - tingkatan tersebut

1. Non Partisipasi

Tingkatan ini bukanlah partisipasi sesungguhnya karena masyarakat tidak memiliki pengaruh dalam mengambil keputusan non partisipasi meliputi :

a. Manipulatif (*Manipulation*)

Masyarakat hanya dilibatkan secara simbolis untuk mendukung agenda pihak berwenang tanpa kekuasaan nyata.

b. Terapi (*Therapy*)

Masyarakat dilibatkan dengan program yang dimaksud untuk mengubah atau mengendalikan mereka bukan untuk memberikan kekuasaan.

2. Tektonisme

Pada tingkat ini masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat tetapi kontrol tetap berada pada pihak berwenang tektonisme meliputi

a. Informasi (*Informing*)

Masyarakat hanya diberi informasi tentang keputusan. Tanpa kesempatan untuk memberikan masukan.

b. Konsultasi (*Consultation*)

Masyarakat diminta pendapatnya, tetapi tidak ada kewajiban bagi pihak berwenang untuk mengikuti masukan tersebut.

c. Penempatan (*Placation*)

Masyarakat diberikan peran terbatas dalam pengambilan keputusan tetapi kekuasaan utama masih dipegang oleh pihak berwenang.

3. Kekuasaan Warga (*Citizen Power*)

Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuasaan nyata dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Kekuasaan warga meliputi:

a. Kemitraan (*Partnership*)

Masyarakat dan pihak berwenang berbagi tanggung jawab secara setara dalam pengambilan keputusan.

b. Delegasi Kekuasaan (*Delegated Power*)

Kekuasaan yang lebih besar diberikan kepada masyarakat memungkinkan mereka untuk memiliki kendali signifikan dalam pengambilan keputusan.

c. Kontrol Warga (*Citizen Control*)

Masyarakat memiliki kendali penuh atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Tingkatan partisipasi Arnstein ini membantu memahami bahwa partisipasi sejati terjadi ketika masyarakat memiliki kekuasaan nyata dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.

2.2.5 Bentuk-Bentuk Partisipasi

Selain tingkatan dalam partisipasi terdapat pula bentuk-bentuk dalam partisipasi yang dijelaskan oleh Effendi dalam Dwiningrum (2011) bahwa terdapat dua bentuk partisipasi, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal, penjelasan diantaranya :

1. Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal adalah bentuk kondisi tertentu vertikal di masyarakat yang terlibat didalamnya atau mengambil bagian dalam program pihak lain yang terlibat didalamnya, sehubungan dengan masyarakat ada sebagai posisi bawahan.

2. Partisipasi Horizontal

Partisipasi horizontal merupakan bentuk partisipasi yang menggambarkan di mana orang tidak mungkin memiliki inisiatif di mana setiap kelompok anggota masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu sama lain, baik dalam melakukan bisnis bersama-sama, dan melakukan kegiatan

Sedangkan menurut Basrowi dalam Dwiningrum (2011) partisipasi dilihat dari bentuknya dapat dibedakan dan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Partisipasi secara Non Fisik

Partisipasi non fisik diartikan sebagai partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan tujuan, serta animo masyarakat. Secara konsep partisipasi non fisik dilakukan secara tidak tampak seperti ide, gagasan, pendapat atau buah pikir. Partisipasi secara non fisik dapat dikategorikan dalam beberapa aspek yaitu

a. Partisipasi dalam perencanaan

Masyarakat terlibat dalam merumuskan rencana kebijakan hal ini mencakup diskusi tentang tujuan, strategi, dan langkah yang akan diambil yang lebih berfokus pada ide dan rencana kegiatan.

b. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Masyarakat memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan ini dapat berupa pemberian suara, usulan atau diskusi yang membantu menentukan keputusan akhir.

c. Partisipasi dalam evaluasi

Masyarakat berperan dalam menilai keberhasilan atau dampak dari suatu program mereka dapat memberikan pendapat, saran dan kritik berdasarkan hasil yang dicapai.

2. Partisipasi secara Fisik

Bentuk partisipasi secara fisik merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha seperti membangun dan mendirikan gedung atau fasilitas untuk masyarakat, seperti gedung sekolah penyediaan buku dan usaha. Berdasarkan penjelasannya partisipasi fisik merupakan partisipasi yang dilakukan secara nyata dan dapat dilihat atau dirasakan, baik berupa tenaga, keterampilan, uang, harta benda dan lain sebagainya. Partisipasi secara fisik dapat dikategorikan dalam beberapa aspek yaitu

- a. Partisipasi dalam menyediakan bahan yang diperlukan
Partisipasi ini merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam memenuhi bahan-bahan tertentu yang diperlukan.
- b. Partisipasi dalam penyediaan sarana dan prasarana
Partisipasi ini mengacu pada kontribusi dalam bentuk alat atau perlengkapan dan infrastruktur yang lebih permanen.
- c. Partisipasi dalam penyediaan modal usaha
Partisipasi ini mencakup kontribusi berupa uang atau aset yang bernilai untuk mendanai kegiatan atau program tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti akan menggunakan teori partisipasi menurut Basrowi dalam Dwiningrum (2011) hal ini dikarenakan peneliti akan menganalisis bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan oleh LSM Emak. Id dalam membantu pemerintah untuk menangani permasalahan sampah di kota bandar lampung, mengingat permasalahan sampah di Kota Bandar Lampung masih belum terselesaikan dan terus mengalami peningkatan volume sampah setiap tahunnya.

2.3 Tinjauan Tentang Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

2.3.1 Pengertian Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

Civil Society atau masyarakat madani merupakan bentuk masyarakat yang sudah beradab serta maju, baik dalam pemikiran maupun dalam perilaku dalam menyikapi memaknai, maupun menjalankan kehidupannya. Terbentuknya masyarakat madani tidaklah semudah membentuk suatu kelompok masyarakat, apalagi di Indonesia terkenal dengan keanekaragaman masyarakat baik ras, agama dan ideologi yang berbeda-beda dari setiap individu.

Istilah *civil society* berasal dari bahasa latin *societes civiles* yang awal mula dipakai oleh Cicero (106 43 SM) seorang orator, politis dan filosofi roma sejak saat itu sampai dengan abad ke -18 pengertian *civil society* masih disamakan dengan negara (*the state*), yaitu sekelompok masyarakat yang mendominasi seluruh kelompok lain. Kemudian seiring perkembangan waktu pengertian masyarakat sipil (*civil society*) mulai mengalami perkembangan. Merujuk sejarah perkembangan masyarakat sipil (*civil society*) di negara barat, banyak ahli di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda untuk maksud serupa. *Civil society* secara umum dipahami sebagai masyarakat sipil yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan lembaga negara. di Indonesia sendiri *civil society* diartikan sebagai masyarakat madani. Masyarakat madani diartikan sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama.

Untuk yang pertama, *civil society* dijadikan sebagai perwujudan suatu tipe keteraturan kelembagaan. Dalam pengertian ini *civil society* dijadikan jargon. Sedangkan yang kedua *civil society* diartikan sebagai seluruh aspek yang menyangkut kajian wilayah filsafat yang menekankan pada nilai kepercayaan. *Civil society* merupakan salah satu elemen penting dari proses demokrasi di Indonesia (Nordholt dalam Adnani 2021). Sebagai salah satu elemen penting dalam proses demokrasi di Indonesia, kekuatan dan kelemahan dari *civil society* turut menentukan kecepatan dan kedalaman transisi, yang pada waktunya akan membantu mempertahankan sistem demokrasi itu sendiri.

Hendro prasetyo (2000) istilah *civil society* pertama kali muncul di Indonesia pada abad 19 tepatnya pada tahun 1998 melalui konferensi dengan tema “ *state and civil society in contemporary Indonesia* . yang di selenggarakan oleh oleh *Monash University Australia* pada tanggal 27 november 1998. Semenjak saat itu wacana *civil society* berkembang begitu cepat dikalangan intelektual Indonesia, berbagai terjemah dan pengertian *civil society* dikeluarkan oleh kaum intelektual Indonesia dengan berbagai argumen. Wacana mengenai *civil society* mulai hangat dibicarakan pada pertengahan tahun 90an saat kekuasaan rezim Suharto mencapai kejayaanya.

Menurut Rosyada (2013) *civil society* bukan satu satunya yang dibentuk dalam perjanjian kemasyarakatan dengan kata lain, *civil society* adalah salah satu bagian politik secara keseluruhan, di mana bagian dari tatanan politik yang lain adalah suatu negara. *civil society* merupakan kekuatan positif di luar kekuatan negara, partai politik dan bisnis yang bisa menumbuhkan kesadaran kritis di kalangan masyarakat. *Civil society* sebagai *the good society* bahwa terwujudnya nilai-nilai dan norma-norma yang baik kepada perilaku institusi masyarakat itu sendiri, maupun institusi pemerintah. Robert Putnam memberikan makna konsep *civil society* sebagai suatu nilai dan norma. Putnam memberikan pemahaman bahwa kehidupan asosional menjamin suatu nilai dan norma-norma tertentu. *Civil society* sebagai *the public sphere* sejak disampaikan sejak zaman Yunani Kuno oleh Aristoteles. Aristoteles menekankan pentingnya *public sphere* untuk menyampaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat dan berkomunikasi dengan pemegang kekuasaan.

Istilah *civil society* juga terkadang diterjemahkan secara gamblang sebagai masyarakat sipil. Usman dalam Adnani (2021) menegaskan *civil society* merupakan sebuah konsep yang penting, yaitu terdapat keinginan dan tuntutan untuk membangun masyarakat yang mampu berkreasi secara maksimal, mampu menyerap nilai-nilai demokrasi secara konkrit, dan harapan akan terciptanya sistem politik dan pemerintahan demokratis dari waktu ke waktu. Karena itu salah satu ide penting yang melekat dalam konsep *civil society* adalah keinginan memperbaiki

kualitas hubungan antara masyarakat dengan institusi sosial yang berada pada sektor publik, sektor swasta, dan Relawan. Definisi lain menurut Rosyada (2013) *civil society* adalah suatu ruang di mana peranan masyarakat dalam perkumpulan sukarela, media massa, perkumpulan profesi serikat buruh dan tani, gereja atau perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang sering disebut juga sebagai organisasi massa Indonesia..

2.3.2 Karakteristik masyarakat sipil (*Civil Society*)

Menurut Karantika dalam Sholihah & Syafi,i (2022) dalam mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) terlebih dahulu perlu untuk diketahui persyaratan yang dapat dipisahkan antara elemen. Masyarakat sipil memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. *Free public sphere*, yaitu setiap warga negara memiliki kebebasan mengemukakan aspirasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Demokrasi yang menjunjung tinggi keterbukaan dan sebagai konsep dari masyarakat madani.
3. Toleran adanya sikap saling menghargai satu sama lain dengan menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika
4. *Pluralisme* yaitu dengan menciptakan tatanan masyarakat yang saling mengakui, menghormati, *pluralisme* berarti mengakui kebutuhan akan pluralitas dan keragaman sekaligus secara aktif memberikan kontribusinya relevansinya dalam rangka mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Keadilan sosial yakni dengan memberikan, membagi hak dan kewajiban yang mencakup seluruh aspek kehidupan setiap warga negara yang seimbang dan proporsional.
6. Karakteristik masyarakat sipil memungkinkan untuk mengurangi terjadinya monopoli dan pemusatan pada kelompok masyarakat tertentu.

Dalam mewujudkan *civil society* bukanlah hal yang mudah khususnya pada masyarakat multikultural. Ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan pandangan tentang keragaman kehidupan di dunia atau kebijakan budaya adalah

multikulturalisme. dilihat dari karakteristik masyarakat sipil (*civil society*) menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia belum memenuhi kriteria masyarakat sipil (*civil society*). Hal ini ditunjukkan masih adanya diskriminasi, rendahnya toleransi. Dalam menegakkan kehidupan masyarakat sipil (*civil society*) perlu adanya lembaga penegak masyarakat yang dapat mengontrol serta mengkritisi jalannya kebijakan penguasa untuk menghindari terjadinya diskriminasi. Persyaratan ini mutlak harus dilakukan demi terwujudnya kekuatan dari masyarakat sipil (*civil society*).

Masyarakat sipil berperan memegang lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai kontrol sosial, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers dan media massa, supremasi hukum, partai politik, dan perguruan tinggi. Adanya Lembaga-lembaga di atas merupakan salah satu upaya penegakkan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas mengenai karakteristik masyarakat sipil dapat disimpulkan lebih lanjut masyarakat sipil (*civil society*) merupakan masyarakat yang berperadaban karena tunduk dan patuh kepada ajaran kepatuhan yang dinyatakan pada supremasi hukum dan peraturan.

2.4 Tinjauan Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan salah satu pilar dalam perwujudan *good governance*. LSM memiliki peran penting diberbagai negara sebagai bentuk kolaborator pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang layak kepada masyarakat yang membutuhkan seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, sosial dan sektor lainnya. LSM sering kali menjalankan advokasi untuk mendapatkan keadilan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dilakukan oleh negara dan pasar (Soetomo 2004).

Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat secara tegas telah didefinisikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian lembaga swadaya masyarakat

dapat disimpulkan bahwa LSM merupakan media atau wadah untuk memungkinkan partisipasi masyarakat agar terlibat langsung dalam proses pembangunan, artinya masyarakat dijadikan subjek dalam proses pembangunan yakni sebagai perencana, pelaksanaan, dan pengawas.

2.4.1 Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Menurut Philip Eldridge (1995) mengemukakan bahwa LSM berfungsi sebagai penggerak pembangunan dan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu LSM juga berfungsi :

1. Kontrol Sosial

LSM bertugas memantau jalanya kebijakan dan program pemerintah memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau praktek korupsi.

2. Perbaikan Kondisi Sosial

LSM berperan aktif dalam program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

3. Perlindungan Lingkungan

LSM memiliki fungsi menjaga kelestarian lingkungan dengan mengedukasi masyarakat serta melakukan advokasi terhadap isu lingkungan.

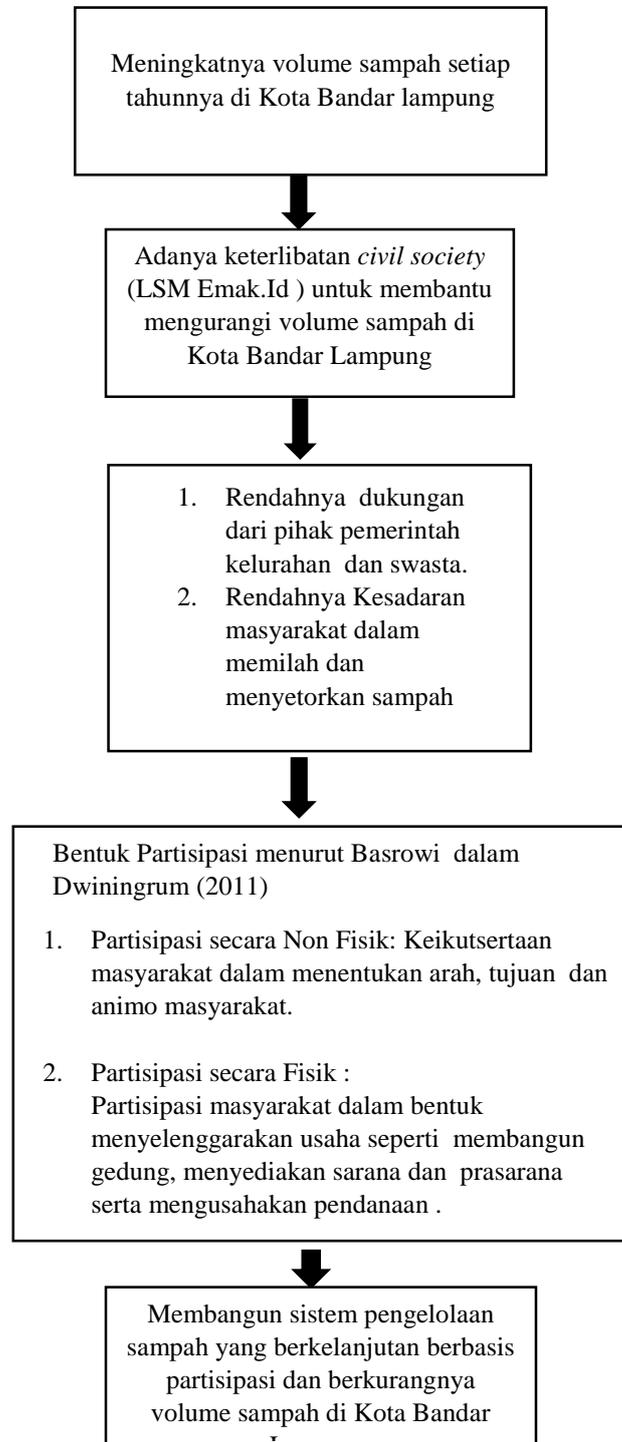
Selain itu Hikam (2013) menyatakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai partisipasi yang sangat penting terhadap pemberdayaan dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh rakyat serta menjadi kontrol terhadap jalannya program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peran ini diwujudkan lewat aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, produktivitas dan kemandirian kelompok masyarakat, termasuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk membangun kewaspadaan, dan kemandirian

Berdasarkan uraian di atas, maka peranan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai organisasi sosial sangat berarti dan dibutuhkan bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai demokrasi yang mempunyai keinginan mewujudkan demokrasi pembangunan. Peneliti menggunakan peran LSM menurut Andriani (2021) karena dalam peranan tersebut mencakup peranan LSM secara keseluruhan tidak hanya kepada masyarakat melainkan juga peranannya bersama dengan pemerintah.

2.5 Kerangka Pikir

Pertambahan penduduk di Kota Bandar Lampung yang terus meningkat dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Mengakibatkan meningkatnya volume sampah di Kota Bandar Lampung, oleh karena itu perlu adanya pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Supaya timbunan sampah di TPS-TPS di Kota Bandar Lampung tidak semakin menumpuk setiap harinya dan menimbulkan sejumlah dampak negatif yaitu : pencemaran lingkungan, masalah kesehatan, banjir, kehilangan estetika kota dan meningkatkan biaya pengelolaan sampah.

Melihat kondisi tersebut masyarakat sipil (*civil society*) lingkungan hidup terutama Emak. Id ikut berpartisipasi dalam inovasi program pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung yaitu bank sampah. Bank sampah merupakan sebuah konsep pengelolaan sampah yang cukup efektif dalam menurunkan volume sampah dan melatih kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Selain itu bank sampah sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.



Gambar 2. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) menjelaskan penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan penjelasan yang disampaikan oleh informan, apa adanya sesuai dengan pernyataan penelitian, kemudian melakukan analisis apa yang melatarbelakangi mereka berperilaku, berpikir, bertindak dan berperasaan. Seperti itu kemudian direduksi, triangulasi, disimpulkan dan diverifikasi yang berkaitan dengan tujuan peneliti, peneliti ingin mendeskripsikan partisipasi *civil society* dalam pengelolaan sampah.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penentuan lokasi Moleong (2007) menjelaskan cara yang ditempuh dengan mempertimbangkan substansi guna mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan. Sementara itu geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini dipilih secara sengaja karena lokasi penelitian merupakan realitas dari masalah yang difokuskan, lokasi pada penelitian ini adalah LSM Emak. Id yang bertempat di Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung Pemilihan LSM Emak. Id adalah sebagai lokasi utama dalam penelitian ini yang berfokus pada pengelolaan sampah. Mengingat bahwa LSM Emak. Id adalah organisasi kemasyarakatan non-pemerintah yang berkecimpung dan ikut andil dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Selain daripada itu LSM Emak. Id merupakan wujud *civil society* yang bergerak dan masih konsisten dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Hal ini berfungsi untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan membatasi pengumpulan data, sehingga mencegah peneliti menjadi kewalahan dengan besarnya jumlah data lapangan yang diperoleh. Fokus penelitian berperan signifikan dalam upaya mengarahkan penelitian agar berada dalam konteks yang diinginkan. Fokus pada penelitian ini adalah menganalisis bagaimana partisipasi yang dilakukan oleh LSM Emak.Id dalam upaya membantu pemerintah mengatasi permasalahan sampah. Teori partisipasi yang digunakan oleh peneliti adalah teori menurut Basrowi dalam Dwiningrum (2011) yang membagi menjadi 2 bentuk dalam memberikan pengaruh terhadap keberhasilan partisipasi yaitu:

1. Partisipasi secara Non Fisik

Partisipasi secara non fisik diartikan sebagai partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan tujuan, serta animo masyarakat . secara konsep partisipasi non fisik dilakukan secara tidak tampak seperti ide, gagasan, pendapat atau buah pikir. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti akan menganalisis bagaimana Partisipasi yang dilakukan oleh LSM Emak. Id Kota Bandar Lampung yang meliputi 3 aspek partisipasi secara non fisik yaitu:

a. Partisipasi dalam Perencanaan

Peneliti menganalisis bagaimana LSM Emak.Id terlibat dalam merumuskan rencana kebijakan hal ini mencakup diskusi tentang tujuan, strategi, dan langkah yang akan diambil yang lebih berfokus pada ide dan rencana kegiatan.

b. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Peneliti menganalisis bagaimana LSM Emak.Id memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan

kebijakan yang akan dilaksanakan ini dapat berupa pemberian suara, usulan atau diskusi yang membantu menentukan keputusan akhir.

c. Partisipasi dalam Evaluasi

Peneliti menganalisis bagaimana LSM Emak.Id berperan dalam menilai keberhasilan atau dampak dari suatu program mereka dapat memberikan pendapat, saran dan kritik berdasarkan hasil yang dicapai

2. Bentuk Partisipasi Fisik

Bentuk partisipasi secara fisik merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha seperti membangun dan mendirikan gedung atau fasilitas untuk masyarakat, seperti gedung sekolah pengadaan buku dan modal usaha. Berdasarkan penjelasan partisipasi fisik merupakan partisipasi yang dilakukan secara nyata dan dapat dilihat. Baik berupa tenaga, keterampilan, uang, harta benda dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis terkait pengadaan sarana dan prasarana kelompok yang dilakukan LSM Emak.id dalam program bank sampah.

a. Pengadaan sarana prasarana kelompok

Peneliti akan menganalisis bagaimana LSM Emak.Id ber kontribusi dalam bentuk alat atau perlengkapan dan infrastruktur yang lebih permanen dalam upaya pengelolaan sampah.

3.4 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, buku, artikel, website, media berita dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang yang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperlukan sebagai data untuk memperoleh dari lapangan penelitian yang akurat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder yang diperoleh selama penelitian adalah data berupa naskah, dokumen resmi, arsip, berita dan media.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi diperoleh melalui wawancara. Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi tentang perspektif, pemikiran, pendapat, dan perasaan partisipan tentang suatu peristiwa, fenomena, realitas atau kenyataan, peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada narasumber (Raco, 2018). Menurut Moleong dalam Wibawa, (2020), terdapat dua metode wawancara yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode wawancara tersebut adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara terstruktur dengan memastikan bahwa materi wawancara sudah terstruktur sesuai dengan pedoman wawancara.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Bidang	Substansi Wawancara
1.	Ahmad Khoirun Syam	Pembina LSM Emak. Id	1) Pembinaan dan koordinasi 2) Penyusunan program 3) Penyediaan fasilitas 4) Monitoring dan evaluasi
2.	Agus Sholihin	Ketua LSM Emak. Id.	1) Sejarah LSM Emak. Id 2) Partisipasi LSM Emak. Id 3) Penyusunan program 4) Monitoring dan evaluasi
3	Elis Novianti	Ibu PKK sekaligus Nasabah LSM Emak. Id	1) Dukungan dengan Emak. Id 2) Manfaat yang diperoleh 3) Koordinasi dengan Emak. Id
4.	Nur Hasanah	Nasabah Kelurahan Bilabong	1) Mendapatkan informasi 2) Mendapatkan pembinaan 3) Memperoleh keuntungan atau manfaat
5.	Kartinawati	Nasabah Kelurahan Bilabong Jaya	1) Mendapatkan informasi 2) Mendapatkan pembinaan 3) Memperoleh keuntungan atau manfaat
6.	Dartijah	Nasabah Kelurahan Langkapura Baru	1) Mendapatkan informasi 2) Mendapatkan pembinaan 3) Memperoleh keuntungan atau manfaat

Sumber : Diolah oleh Peneliti Tahun 2024

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia seperti data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah dan hal lainnya yang berhubungan dengan LSM Emak. Id Kota Bandar Lampung serta memberikan pemahaman yang lebih luas tentang subjek penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009) pengolahan data kualitatif bersifat interaktif dan berulang ulang sampai data 41 lengkap dan jenuh. Ketika menganalisis data, peneliti akan membaca atau mempelajari data dan memberikan kode atau kata kunci pada data, lalu mengurutkan dan mengklasifikasikan data, sehingga menemukan hubungan antara data dan fenomena untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru. Analisis data dilakukan melalui tiga langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah ulasan dari semua aktivitas yang direkam yang diperoleh oleh teknik observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Reduksi data merupakan kegiatan abstrak atau ringkasan data dalam laporan evaluasi sistem dan fokus pada hal-hal penting.

2. Display Data

Display Data adalah untuk meringkas poin utama, dan kemudian mengaturnya menjadi deskripsi naratif dan sistematis, agar lebih mudah ditemukan dalam menentukan tema sentral berdasarkan fokus atau ekspresi unsur-unsur yang dievaluasi, dan memfasilitasi penelitian untuk melihat deskripsi elemen yang dievaluasi keseluruhan. Display data menampilkan data yang disajikan dalam beberapa tampilan matriks, grafik, bagan, diagram alur, gambar, dan lain sebagainya.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan untuk mencari makna dari data yang terkumpul lebih teliti. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari pola, tema, bentuk, hubungan, persamaan dan perbedaan, faktor yang mempengaruhi. Hasil dari kegiatan ini adalah kesimpulan secara keseluruhan, lengkap dari hasil penelitian..

3.7 Teknik Keabsahan Data

Moleong (2007) menyatakan bahwa teknik keabsahan data yaitu kriteria yang digunakan untuk menilai keabsahan data yang diperoleh. Terdapat beberapa syarat tertentu yang harus dicapai untuk menetapkan keabsahan suatu data dalam penelitian kualitatif. Selain itu Moleong (2007) mengungkapkan dalam penelitian kualitatif, keabsahan data bergantung pada pemenuhan kriteria-kriteria tertentu yaitu:

1. Kredibilitas

Secara mendasar, kredibilitas sebagai pembaharuan konsep validitas, di mana validitas merupakan ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh dengan instrumen, yakni apakah instrumen itu, akurat mengukur variabel yang sesungguhnya. Bila ternyata instrumen tidak mengukur apa yang seharusnya diukur maka data yang diperoleh tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga hasil penelitian juga tidak dapat dipercaya, atau dengan kata lain tidak memenuhi validitas. Validitas internal dapat dilakukan dengan memperpanjang masa observasi, melakukan pengamatan secara terus menerus, triangulasi data, membicarakan dengan orang lain (*peer debriefing*), menganalisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *member check*. dalam melakukan penelitian ini, untuk mencapai kredibilitas peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Triangulasi data, tujuan triangulasi data dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian di lapangan. Triangulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan sumber dan metode yang artinya peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. triangulasi data dengan sumber ini antara lain dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan *key informan*. Triangulasi data dilakukan dengan cara, pertama

membandingkan hasil pengamatan pertama dengan pengamatan berikutnya, kedua membandingkan data hasil wawancara pertama dengan hasil wawancara berikutnya. Penekanan dari hasil perbandingan ini bukan masalah kesamaan pendapat, pandangan, pikiran semata-mata. Melainkan lebih penting jika bisa mengetahui alasan terjadinya perbedaan dari hasil penelitian.

2. Transferabilitas

Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau disesuaikan dengan konteks lain di luar penelitian awal. Dalam penelitian kualitatif, aspek ini menunjukkan apakah temuan dan kesimpulan dapat diterapkan pada populasi atau situasi yang serupa namun berbeda. Oleh karena itu, transferabilitas menilai sejauh mana hasil penelitian dapat direplikasi dalam kondisi serta sejauh mana orang lain dapat menggunakannya dalam konteks mereka sendiri. Untuk memastikan transferabilitas, peneliti menyusun laporan yang rinci, sistematis, dan mudah dipahami, sesuai dengan pedoman penulisan ilmiah Universitas Lampung tahun 2020..

3. Dependabilitas(*Dependability*)

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, perlu dilakukan audit terhadap seluruh proses penelitian untuk menilai keandalan data. Dalam beberapa kasus, data dapat tersedia meskipun peneliti tidak secara langsung terlibat dalam penelitian. Oleh karena itu, pengujian dependabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar berasal dari proses penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti secara aktif berdiskusi dengan pembimbing guna memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

4. Konfirmabilitas (*Konfirmability*)

Konfirmabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian mencerminkan proses yang telah dilakukan. Artinya, harus ada kesesuaian antara hasil penelitian dengan langkah-langkah yang ditempuh dalam memperoleh data. Untuk memastikan aspek ini, dilakukan audit secara menyeluruh terhadap semua tahap penelitian. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing mencakup keabsahan data, logika dalam menarik kesimpulan, tingkat ketelitian, serta kesesuaian hasil penelitian dengan prosedur yang telah diterapkan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang dilakukan pada bab empat bisa ditarik kesimpulan, mengenai Partisipasi Civil society dalam pengelolaan sampah(studi pada LSM Emak terhadap program bank sampah di Kota Bandar Lampung) yang dilihat dari aspek- aspek partisipasi menurut Basrowi dalam Dwiningrum (2011) sebagai berikut;

1. Partisipasi secara non fisik

a. Perencanaan

Program bank sampah LSM Emak.Id bertujuan mengurangi sampah dan memberdayakan ibu rumah tangga. Meski partisipasi masyarakat cukup aktif, keterlibatan mereka masih terbatas pada pelaksanaan. Kendala utama adalah kurangnya dukungan dengan pemerintah kelurahan dan swasta serta terbatasnya jangkauan partisipasi.

b. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam program bank sampah Emak.Id terpusat pada pengurus inti dengan partisipasi warga bersifat konsultatif. Keterlibatan kelurahan dan masyarakat dalam perencanaan masih minim. Diperlukan mekanisme yang lebih partisipatif dan inklusif agar program lebih responsif terhadap kebutuhan warga dan berkelanjutan.

c. Evaluasi

Keberhasilan program bank sampah Emak.Id ditentukan oleh partisipasi aktif dan kesadaran kolektif masyarakat, bukan hanya evaluasi formal. Evaluasi partisipatif memperkuat komunitas, namun masih lemah dalam dokumentasi dan sistematisasi. Diperlukan penguatan metode evaluasi agar dampak program dapat diukur dan dijadikan model kebijakan yang berkelanjutan.

2. Partisipasi fisik

a. Pengadaan sarana dan prasarana

Program bank sampah Emak.Id berdampak positif pada peningkatan kesadaran masyarakat, namun masih perlu didukung dengan perluasan distribusi fasilitas dan peningkatan sarana pemilahan di tingkat rumah tangga untuk menunjang efektivitas program.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran kepada pihak pemerintah kelurahan dan LSM Emak. Id ,yang dapat bermanfaat untuk kebaikan masyarakat, dan kota bandar lampung khususnya mengenai pengelolaan sampah.

1. Bagi Pihak Pemerintah

Pemerintah kelurahan diharapkan dapat meningkatkan peran aktif dalam mendukung program bank sampah melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan memfasilitasi koordinasi antara LSM, RT/RW, dan tokoh masyarakat agar tercipta sinergi dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti tempat penyimpanan, alat pemilah, dan kendaraan pengangkut menjadi hal yang penting untuk menunjang operasional program. Sosialisasi dan edukasi rutin

kepada warga juga perlu dilakukan guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. pengintegrasian program bank sampah ke dalam agenda pembangunan kelurahan akan memperkuat keberlanjutan program sekaligus menjadi contoh praktik baik di wilayah lain.

2. Bagi LSM Emak. Id Dan Komunitas Lingkungan Lain

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, LSM Emak.Id dan komunitas lingkungan perlu meningkatkan sarana dan prasarana pengumpulan sampah, seperti tempat yang lebih banyak dan terorganisir. Diversifikasi sumber dana, seperti dari sektor swasta atau crowdfunding, juga perlu dijajaki. Kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui proposal atau kemitraan terstruktur sangat penting. Pendidikan dan penyuluhan berkelanjutan kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan serta pemberian insentif dapat mendorong partisipasi aktif. Infrastruktur digital, seperti aplikasi pemantauan pengelolaan sampah, dapat meningkatkan akurasi dan evaluasi program. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan LSM Emak.Id dan komunitas lingkungan dapat mengatasi kendala dan mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnani Adriani. 2021. "Civil Society Di Indonesia: Suatu Konsekuensi Logis Terwujudnya Good Governance." *Jurnal ensiklopediaku* Vol.3 No.4: 90–96.
- Astuti D, Siti Irene 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Auliya, Aziza Nur, Erlinda Choirunnisa, and Lukman Arif. 2020. "Peran Lsm Spektra Dalam Mutualism Partnership Program Bank Sampah." *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial* 9(1): 52–66.
- Arnstein, Sherry. 1969. *A. Leader of Citizen Participation*. Washington. D.C: American Institute of Planners.
- Aziz, Muhammad Ilham, Dadan Kurniansyah, and Mochamad Faisal Rizki. 2021. "Keberlanjutan Civil Society Dalam Pengolahan Sampah Organik Melalui Budidaya Maggot Di Desa Benge Kabupaten Karawang." *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* 4(1): 069.
- Bagustiandi, Tatas. 2024. "Analisis Dampak Pertumbuhan Populasi Terhadap Peningkatan Volume Sampah Di Gili Trawangan." *Environmental, Social, Governance and Sustainable Business* 1(1): 1–10.
- Chambers, Robert. 1983. *Rural Development : Putting the Last First*. London: Longman Scientific and Technical.
- Dahl, Robert. 1989. *Democracy and Its Critis*. New Haven: Yale university Press.
- Eldridge, Philip J. 1995. *Non Government Organization and Democratic Participation in Indonesia*. New york: Oxford University Press.
- Hikam, Muhammad. 2013. *Demokrasi Dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka.
- Huberman, Saldana, M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications.

- Junaidi, L. (2022). Manajemen Bank Sampah dalam pemberdayaan ekonomi nasabah (Studi Kasus Pada Bank Sampah Kelompok Sejahtera (BSKS) Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah) (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Khumairoh, Adinda et al. 2024. "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Tpa Jatibarang Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 13(2) : 1-19.
- Lisa, Fasihul et al. 2024. "Pola Kemitraan Pemerintah Kota Surabaya Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Jambangan Kota Surabaya." 10(April).
- Mardikanto, Toto dan Poerwoko Soebianto. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Melyanti, Imelda Merry. 2019. "Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, Dan Swasta Dalam Program Bank Sampah Di Pasar Baru Kota Probolinggo." *Kebijakan dan manajemen publik* 2(1): 1–9.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, I., Purnomo, E. P., & Khairunnisa, T. (2025). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Bank Sampah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Pringsewu. *Journal of Governance Innovation*, 7(1), 392-409.
- Patuwo, Nafiri C. et al. 2020. "Karakteristik Sampah Laut Di Pantai Tumpaan Desa Tateli Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa." *Jurnal Pesisir Dan Laut Tropis* 8(1): 70.
- Prasetyo, Hendro. 2000. *Civil Society: Konsep Dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pratama, R. A., & Ihsan, I. M. (2017). Peluang penguatan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah perkotaan studi kasus: bank sampah Malang. *Jurnal Teknologi Lingkungan BPPT*, 18(1), 112-119.
- Pratiwi, D., Sinia, R. O., & Fitri, A. (2020). Peningkatan pengetahuan masyarakat

terhadap drainase berporus yang difungsikan sebagai tempat peresapan air hujan. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 1(2).

- Prihatin, Rohani Budi. 2020. "Pengelolaan Sampah Di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus Di Kota Cirebon Dan Kota Surakarta." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 11(1): 1–16.
- Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya
- Rahmadani, H. M. I., & Rahmawati, D. E. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(2), 7280.
- Rosyada, Dede, DKK. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Hak Azazi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Medika.
- Santoso, Dwi, Ety Wahyuni, Anang Sulistyono, and Nurman Hidayat. 2023. "Partisipasi Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Dalam Mewujudkan Lingkungan Hijau Yang Bebas Bau Tps: Peran Penghijauan Dalam Pengelolaan Sampah Yang Berkelanjutan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo* 7(2): 132–40.
- Saputra, T., Astuti, W., Nasution, S. R., & Zuhdi, S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Community Participation in Waste Management Waste Bank. *J Kebijakan publik*, 13(3), 246-51.
- Sen, Amartya. 1999. *Development As Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Seroan, Miracle et al. 2024. "View of Pemodelan Matematika Untuk Perkiraan Penduduk Kabupaten Minahasa Pada Tahun 2026 Dan 2027 Menggunakan Model Logistik.Pdf." *Algoritma* 2(2): 179–98.
- Sholihah, Azzah, and Imam Syafi'i. 2022. "Civil Society Dan Multikulturalisme Dalam Pendidikan Islam." *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 4(2): 79–86.
- Soetomo. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Konsep Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soraya, Hana. 2020. "Analisis Kemitraan Dalam Program Dance4life Untuk Meningkatkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (Studi Pada Pkbi

Provinsi Lampung Dan Smkn 4 Bandar Lampung.” Universitas lampung, Bandar Lampung.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2008. *Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Suryani, A. S. (2014). Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(1), 71-84.

Tarigan, I V. 2023. “Peranan Civil Society Dalam Pengurangan Sampah Di Kota Pematang Siantar.”

Therisia Aprillia, dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung. Alfabeta

Widyawati, Widyawati, Sukadji Sarbi, dan Dermawan Dermawan. 2023. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Saluran Irigasi Dusun Palece.” *Journal Peqguruang: Conference Series* 5(2): 753.

Wulandari, W., & Sumardjo, S. (2019). Kepemimpinan Lokal dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Kasus: Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor). *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 3(2).

Yusuf, Rima Ranintya. 2021. “Globalisasi Dan Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).” *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik* 3(2): 3

<https://bandarlampungkota.go.id/new/berita-12629--Jumlah-Timbulan-Sampah-di-Kota-Bandar-Lampung--2011-2023-.html>.(Diakses tanggal 28 Juli 2024).

[https://lampung.idntimes.com/news/lampung/rohmah-mustaurida/BankSampah_Mangkrak_di_Lampung_Peran_Pengelola_Hal_Utama\(idntimes.com\)](https://lampung.idntimes.com/news/lampung/rohmah-mustaurida/BankSampah_Mangkrak_di_Lampung_Peran_Pengelola_Hal_Utama(idntimes.com)) 56
(Diakses tanggal 11 November 2024).

<https://nasional.tempco.co/read/408773/bekasi-dan-bandar-lampung-terkotor-se-indonesia> (Diakses tanggal 21 Oktober 2024).

<https://sumajaku.com/2021/03/22/permendagri-skt-ormas-lsm-izin-pusat> (Diakses tanggal 08 November 2024).

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/?utm> (Diakses tanggal 08 November 2024)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/281643/perda-kota-bandar-lampung-no-6-tahun-2023> (Diakses tanggal 03 Mei 2025)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/233754/permen-lhk-no-14-tahun-2021>
(Diakses tanggal 03 Mei 2025)